

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Wonosobo
Tahun 2015**

A. PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang LKPJ Kepada DPRD, LPPD kepada Pemerintah, dan ILPPD kepada masyarakat, kepala daerah wajib memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media.

B. RPJMD DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2015 periode tahun kelima dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015. Visi yang ditetapkan --"menuju Wonosobo lebih maju dan sejahtera", merupakan perkembangan lebih lanjut dari visi periode lima tahun sebelumnya yaitu "membangun bersama rakyat, sejahtera bersama rakyat", yang dijabarkan pada lima misi yang diemban yaitu :

1. Melanjutkan praktik pemerintahan partisipatif dan demokratis menuju masyarakat yang lebih sejahtera.
2. Meningkatkan kemajuan pembangunan menuju kemandirian daerah
3. Meningkatkan pelayanan sosial dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah.
5. Meningkatkan dimensi keadilan dan meniadakan kekerasan dalam semua bidang.

C. PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran 2015 diawali dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, secara umum terbagi dalam 3 (tiga) aspek, yaitu:

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Pendapatan dianggarkan sebesar **Rp.1.454.838.128.297,00** dapat direalisasi sebesar **Rp.1.411.260.136.883,00** atau 97,00% yang berarti kurang dari anggaran sebesar **Rp.43.577.991.414,00** dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
1.	2.	3.	4
PENDAPATAN DAERAH	1.454.838.128.297,00	1.411.260.136.883,00	(43.577.991.414,00)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	154.515.664.500,00	161.708.114.651,00	7.192.450.151,00
a. Pajak Daerah	25.905.000.000,00	27.484.141.296,00	1.579.141.296,00
b. Retribusi Daerah	8.169.730.500,00	9.841.670.606,00	1.671.940.106,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Laba BUMD)	10.203.850.000,00	9.290.538.963,00	(913.311.037,00)
d. Lain - lain PAD yang Sah	110.237.084.000,00	115.091.763.786,00	4.854.679.786,00
2. Pendapatan Transfer	1.227.460.183.797,00	1.182.689.742.232,00	(44.770.441.565,00)
1. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	854.196.099.000,00	836.382.532.154,00	(17.813.566.846,00)
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	33.511.272.000,00	29.725.922.750,00	(3.785.349.250,00)
b. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	1.559.886.000,00	1.667.104.404,00	107.218.404,00
c. Pendapatan Dana Alokasi Umum	748.447.761.000,00	748.447.761.000,00	-
d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus	70.677.180.000,00	56.541.744.000,00	(14.135.436.000,00)
2. Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya	198.915.182.000,00	198.827.670.000,00	(87.512.000,00)

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
a. Dana Otonomi Khusus	-	-	-
b. Dana Penyesuaian	198.915.182.000,00	198.827.670.000,00	(87.512.000,00)
3. Transfer Pemerintah Provinsi	174.348.902.797,00	147.479.540.078,00	(26.869.362.719,00)
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	90.497.414.797,00	81.707.802.179,00	(8.789.612.618,00)
b. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
c. Bantuan Keuangan	83.851.488.000,00	65.771.737.899,00	(18.079.750.101,00)
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	72.862.280.000,00	66.862.280.000,00	(6.000.000.000,00)
a. Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	-	(6.000.000.000,00)
b. Pendapatan Dana Darurat	-	-	-
c. Pendapatan Lainnya	66.862.280.000,00	66.862.280.000,00	-
JUMLAH PENDAPATAN	1.454.838.128.297,00	1.411.260.136.883,00	(43.577.991.414,00)

Sumber: APBD 2015

B. Pengelolaan Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 setelah Perubahan sebesar Rp.1.753.919.457.572 dapat direalisasi Rp.1.522.012.029.726 atau 86,78% kurang dari anggaran sebesar Rp.231.907.427.846 yang terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp.993.724.708.645 dapat direalisasi sebesar Rp.899.241.921.484 atau 90,49%,
- b. Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp.760.194.748.927,00 dapat direalisasi sebesar Rp.622.770.108.242 atau 81,92%, dengan rincian sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
1.	2.	3.	4.	5.
2.	BELANJA DAERAH	1.753.919.457.572	1.522.012.029.726	(231.907.427.846)
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	993.724.708.645	899.241.921.484	(94.482.787.161)
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	799.208.595.237	713.268.321.049	(85.940.274.188)
2.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	748.245.753.032	672.300.883.056	(75.944.869.976)
2.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	45.675.250.000	36.167.076.207	(9.508.173.793)
2.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.802.000.000	3.750.500.000	(51.500.000)
2.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.158.150.000	810.705.000	(347.445.000)
2.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	327.442.205	239.156.786	(88.285.419)
2.1.4.	BELANJA HIBAH	32.574.749.435	30.628.168.435	(1.946.581.000)
2.1.4.03.	Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa	70.000.000	70.000.000	-
2.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi	24.201.749.435	24.074.749.435	(127.000.000)
2.1.4.06.	Belanja Hibah kepada Kelompok / Anggota Masyarakat	8.303.000.000	6.483.419.000	(1.819.581.000)
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	3.509.904.048	2.991.639.256	(518.264.792)
2.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	85.500.000	60.000.000	(25.500.000)
2.1.5.03.	Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	3.424.404.048	2.931.639.256	(492.764.792)
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	3.406.203.000	3.060.322.050	(345.880.950)

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
2.1.6.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.590.500.000	2.316.299.999	(274.200.001)
2.1.6.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	815.703.000	744.022.051	(71.680.949)
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	147.188.949.694	147.026.667.694	(162.282.000)
2.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	146.288.949.694	146.288.949.694	-
2.1.7.05.	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	900.000.000	737.718.000	(162.282.000)
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.836.307.231	2.266.803.000	(5.569.504.231)
2.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	7.836.307.231	2.266.803.000	(5.569.504.231)
2.2.	BELANJA LANGSUNG	760.194.748.927	622.770.108.242	(137.424.640.685)
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.223.755.892	22.547.968.241	(1.675.787.651)
2.2.1.01.	Honorarium PNS	8.419.142.600	7.816.308.750	(602.833.850)
2.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.969.358.000	3.614.353.040	(355.004.960)
2.2.1.03.	Uang Lembur	1.078.369.400	1.022.029.500	(56.339.900)
2.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	10.756.885.892	10.095.276.951	(661.608.941)
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	391.850.506.657	342.763.199.096	(49.087.307.561)
2.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.284.204.912	5.251.197.938	(33.006.974)
2.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.178.737.730	11.645.780.536	(1.532.957.194)
2.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	54.372.312.645	39.201.028.176	(15.171.284.469)
2.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	314.110.000	296.255.775	(17.854.225)
2.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.840.864.456	5.488.822.188	(352.042.268)
2.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.493.047.400	4.698.347.893	205.300.493
2.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	906.530.000	888.210.000	(18.320.000)
2.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	525.575.000	483.517.500	(42.057.500)
2.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.356.000	10.049.329.625	(451.026.375)
2.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.554.181.500	2.027.359.100	(2.526.822.400)
2.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	278.330.000	275.227.550	(3.102.450)
2.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	473.320.000	413.644.000	(59.676.000)
2.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.281.555.855	14.688.843.758	(2.592.712.097)
2.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	75.000.000	74.967.740	(32.260)
2.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.301.250.000	2.091.372.636	(209.877.364)
2.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	7.143.650.000	6.260.025.375	(883.624.625)
2.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	288.687.000	287.789.000	(898.000)
2.2.2.23.	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	143.309.273.210	122.901.615.847	(20.407.657.363)
2.2.2.24.	Belanja Bantuan Sosial Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	130.325.000	96.704.000	(33.621.000)
2.2.2.25.	Belanja Stimulan, Uang saku, hadiah, penghargaan, penggantian biaya	35.968.680.780	34.634.311.666	(1.334.369.114)
2.2.2.26.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	82.675.285.169	79.129.635.833	(3.545.649.336)
2.2.3.	BELANJA MODAL	344.120.486.378	257.458.940.905	(86.661.545.473)
2.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	10.350.000.000	340.985.500	(10.009.014.500)
2.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat	773.998.000	772.398.000	(1.600.000)

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
	Berat			
2.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	5.354.659.500	4.827.677.426	(526.982.074)
2.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	100.000.000	95.210.000	(4.790.000)
2.2.3.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor	50.000.000	45.110.000	(4.890.000)
2.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	507.500.000	296.323.000	(211.177.000)
2.2.3.08.01.	Belanja Modal Alat Bengkel	507.500.000	296.323.000	(211.177.000)
2.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	810.000.000	153.019.000	(656.981.000)
(280.757.850)	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.699.535.750	1.418.777.900	
(394.268.173)	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.416.562.500	3.022.294.327	
2.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.955.505.150	5.034.539.211	(2.920.965.939)
2.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	16.000.000	14.310.500	(1.689.500)
2.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga	63.787.500	62.848.550	(938.950)
2.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	444.357.000	423.831.058	(20.525.942)
2.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	758.211.600	728.540.481	(29.671.119)
2.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	105.175.000	87.270.013	(17.904.987)
2.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	30.855.913.500	28.132.509.901	(2.723.403.599)
2.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	9.495.253.692	4.471.305.004	(5.023.948.688)
2.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	111.329.004.749	85.587.468.780	(25.741.535.969)
2.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	6.103.182.000	4.731.289.500	(1.371.892.500)
2.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	8.521.023.500	7.876.676.628	(644.346.872)
2.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	2.905.300.000	2.539.932.000	(365.368.000)
2.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	262.250.000	259.087.000	(3.163.000)
2.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	124.279.765.297	94.061.939.778	(30.217.825.519)
2.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	9.412.863.240	4.968.277.732	(4.444.585.508)
2.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	1.150.400.000	1.141.116.071	(9.283.929)
2.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Penanggulangan Bencana	239.402.000	210.457.500	(28.944.500)
2.2.3.33.	Belanja Modal Alat - alat Industri	150.000.000	149.500.000	(500.000)
2.2.3.34.	Belanja Modal Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pedesaan	100.000.000	99.510.000	(490.000)
2.2.3.35.	Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perhubungan	245.982.700	233.194.100	(12.788.600)
2.2.3.36.	Belanja Modal Alat-alat Pengolahan	2.000.000.000	1.985.798.000	(14.202.000)

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
	JUMLAH	1.753.919.457.572	1.522.012.029.726	(231.907.427.846)

Sumber: APBD 2015

C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah.

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Penerimaan direncanakan sebesar Rp.340.850.066.897,00 dapat direalisasi sebesar Rp340.509.798.458,00 atau 99,91%, kurang dari anggaran sebesar Rp340.268.439 yang terdiri dari :
 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) direncanakan Rp.327.766.817.462,00 dapat direalisasi sebesar Rp327.457.284.668,00 atau 99,91%.
 - Pencairan Dana Cadangan direncanakan sebesar Rp13.083.249.435,00 dapat direalisasi sebesar Rp13.000.742.290,00 atau 99,37%
 - Penerimaan Piutang Daerah direncanakan Rp0,00 dapat direalisasi sebesar Rp51.771.500,00.
- 2) Pembiayaan Pengeluaran direncanakan sebesar Rp41.768.737.622,00 dapat direalisasi sebesar Rp41.768.737.622,00 atau 100,00 % berupa :
 - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kab. Wonosobo dengan dianggarkan Rp41.768.737.622,00 dapat direalisasi sebesar Rp41.768.737.622,00 atau 100,00%

Uraian lebih lanjut pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran sebagaimana pada tabel dibawah ini.

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
1.	2.	3.	4.	5.
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	382.618.804.519,00	382.278.536.080,00	(340.268.439)
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	340.850.066.897,00	340.509.798.458,00	(340.268.439)
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	327.766.817.462,00	327.457.284.668,00	(309.532.794)
3.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	327.766.817.462,00	327.457.284.668,00	(309.532.794)
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	13.083.249.435,00	13.000.742.290,00	(82.507.145)
3.1.2.01.	Pencairan Dana Cadangan	13.083.249.435,00	13.000.742.290,00	(82.507.145)
3.1.6.	Penerimaan piutang daerah	-	51.771.500,00	51.771.500
3.1.6.05.	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank	-	51.771.500,00	51.771.500
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	41.768.737.622,00	41.768.737.622,00	0
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	41.768.737.622,00	41.768.737.622,00	0
3.2.2.02.	Badan usaha milik daerah (BUMD)	41.768.737.622,00	41.768.737.622,00	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	299.081.329.275,00	298.741.060.836,00	(340.268.439,00)

Sumber: APBD 2015

Adapun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.187.989.167.993,20

Berikut akan diuraikan pelaksanaan desentralisasi berdasarkan masing-masing urusan:

1. URUSAN WAJIB : PENDIDIKAN

Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2015 Berdasarkan Indikator RPJMD 2010-2015 :

- | | |
|---|--------|
| 1. APK PAUD | 35,49 |
| 2. Rasio pendidik dengan peserta didik PAUD | 1:16 |
| 3. APK SD/MI/Paket A | 109,39 |

4. APK SMP/MTs/Paket B	95,32
5. % kelulusan SD/MI	97,66
6. % kelulusan SMP/MTs minimal	99,96
7. Rasio Pendidik dengan peserta didik SD/MI	1:15
8. Rasio Pendidik dengan peserta didik SMP/MTs	1:14
9. Rasio murid dengan kelas SD/MI	1: 24
10. Rasio murid dengan kelas SMP/MTs	1: 30
11. APK SMA/SMK/MA	54,72
12. Rasio siswa SMK : SMA	53:47
13. Rasio Pendidik dengan peserta didik SMA/SMK/MA	1:14
14. Rasio murid dengan kelas SMA/SMK/MA	1:30
15. Jumlah Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SSM) SMA/SMK ISO 9001-2008	9

2. URUSAN WAJIB: KESEHATAN

Capaian kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2015 berdasarkan Indikator Kinerja RPJMD 2010-2015 :

- 1 Angka Kematian Bayi = 9.66 per mil kelahiran hidup
- 2 Angka Kematian Ibu = 84.33 per seratus ribu kelahiran hidup
- 3 Angka Harapan Hidup = 70,80 Tahun
- 4 Prevalensi Gizi Kurang = 1,74 %

3. URUSAN WAJIB: LINGKUNGAN HIDUP

Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015 berdasarkan Indikator Kinerja RPJMD menurut data dari Badan LH Kabupaten Wonosobo tahun 2015 ::

1. Kualitas / kelas air = 1
2. % kelestarian sumber air = 80%*
3. % peningkatan debit sumber air = 2%
4. % meningkatnya kualitas udara ambien di sekitar pabrik = 1%
5. % meningkatnya kualitas udara ambien di sekitar pemukiman = 1%
6. % meningkatnya kualitas udara ambien di daerah transportasi = 1%
7. % menurunnya kasus kebakaran hutan = 1
8. Rasio kesesuaian regulasi bidang LH = 33
9. Nilai Adipura = 74,50
10. Jumlah CSR yg diberikan utk mendukung penyelamatan lingkungan (perusahaan) = 4
11. % peningkatan penyerapan CO2 = 0,75

4. URUSAN WAJIB: PEKERJAAN UMUM

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 menurut data dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dan Dinas Ciptakarya Tata Ruang dan Kebersihan :

- % Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik = 57,19%
- % Daerah irigasi dalam kondisi baik = 70,49%
- % Rumah tangga bersanitasi = 47,95%
- % Jumlah jembatan kondisi baik = 70%

5. URUSAN PENATAAN RUANG

Capaian kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2015 berdasarkan Indikator Kinerja EKPPD dan Indikator Kinerja RPJMD menurut data dari Bappeda Wonosobo 2015 :

1. Informasi Penataan Ruang : Ada (peta digital dan analog RTRW Kab. Wonosobo)
2. Pelibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTR : 5 x FGD/konsultasi publik penyusunan revisi RTRW
3. Izin Pemanfaatan Ruang : Ada (dalam bentuk penerbitan 300-an surat informasi/rekomendasi tata ruang)
4. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang : Tidak ada aduan pelanggaran
5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik : 16%

6. URUSAN WAJIB: PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Capaian kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2015 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Bappeda Wonosobo :

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA RPJP : Ada, Perda nomor 1 Tahun 2010 tentang RPJP 2005-2025
2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA : Ada, Perda no. 1 Tahun 2011 tentang RPJMD Kab Wonosobo Tahun 2011-2015
3. % Ketepatan waktu tahapan Musrenbang RKPD : 100%
4. % kesesuaian kegiatan RKPD dengan APBD : 81,29%
5. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERDA : Ada, Perbup No.51 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kab. Wonosobo Tahun 2016
6. Tersedianya data profil daerah : Ada
7. Tersedianya dokumen evaluasi pembangunan : Ada
8. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD : 82,87%

7. URUSAN PERUMAHAN

Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perumahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2014/SPM Bidang perumahan rakyat menurut analisis dari Bappeda, KPM, Dinas Ciptakarya Tata Ruang dan Kebersihan, Dinas LHK tahun 2015 :

- Rasio jumlah rumah per jumlah KK = 0,863
- Rasio rumah layak huni per jumlah total rumah = 0,885
- Jumlah kompleks perumahan yang dibangun pengembang = 27
- % luasan permukiman kumuh = 0,796 %
- % Rmh tangga pengguna air bersih = 95,35%
- % taman lingkungan/ruang terbuka hijau dari luasan pemukiman = 44,29
- Jumlah sarana pelayanan penanganan bencana kebakaran = 3

8. URUSAN WAJIB: KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 berdasarkan indikator RPJMD 2010-2015 sesuai data yang diolah oleh Disdikpora dan Kantor Kesbangpol dan linmas Wonosobo :

- Jumlah kegiatan produktif kepemudaan = 7
- Jumlah organisasi kepemudaan = 142
- Jumlah sarpras olahraga standar nasional = 2

9. URUSAN WAJIB: PENANAMAN MODAL

Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2015 Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Berdasarkan Indikator RPJMD 2010-2015 sesuai data dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Wonosobo :

- Realisasi PMDN thn 2015 = Rp. 308.950.007.351,-, naik 40,14% dari tahun 2014 senilai Rp 220.450.153.758,-.
- Jumlah Investasi = 761
- Nilai Investasi (milyar) = 1.098,86
- Tenaga Kerja yang terserap = 2.398 orang (terbanyak dari sector Perdagangan & Reparasi : 1.660 orang)

10. URUSAN WAJIB: KOPERASI DAN UMKM

Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2015 Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Berdasarkan Indikator RPJMD 2010-2015 menurut data Kantor Koperasi dan UMKM Wonosobo 2015 :

- % Koperasi aktif = 61,83%
- % Usaha Mikro dan Kecil = 98,78%
- Jumlah UMKM = 58.162
- Jumlah Koperasi = 359
- Jumlah aset koperasi (juta) = 1.100
- Jumlah asset UMKM (juta) = 38.521

11. URUSAN WAJIB: KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 menurut data dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil :

- % jumlah pemilik KTP berbasis NIK = 88,52%
- % Jumlah kepemilikan KK = 99,8%
- % kepemilikan Akta kelahiran = 79,3
- % penduduk yang teregistrasi (jumlah penduduk yang mempunyai NIK) = 100
- % Anak Lahir yg membuat Akta Kelahiran = 99,58
- % penduduk meninggal yg membuat Akta Kematian = 10,74

- lama pengurusan Akte kelahiran = 5 hari
- lama pengurusan KTP = 5 hari

12. URUSAN WAJIB: KETENAGAKERJAAN

Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2015 Berdasarkan IKK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dan berdasarkan Indikator RPJMD 2010-2015 dari Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

- Tingkat partisipasi angkatan kerja = 72,73%
- Pencari Kerja yang ditempatkan = 2.663
- Kualitas tenaga kerja rasio kelulusan S1, S2, S3 = 3,53%
- Tingkat ketergantungan rasio ketergantungan = 51,47%
- % Tingkat pengangguran terbuka = 45,43%
- Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan = 4.024
- Jumlah BKK (Bursa Kerja Khusus) = 22
- Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat = 444
- Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi = 336
- Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan = 150
- Jumlah kasus yang diselesaikan melalui perjanjian kerjasama = 4
- Rasio UMR dan KHL = UMR: Rp 1.166.000,00
KHL: Rp 1.166.000,00
- Jumlah pekerja/buruh yang ikut program Jamsostek = 6.131
- Jumlah besaran pemeriksaan perusahaan = 40 kali
- Jumlah besaran pengujian peralatan perusahaan = 30%
- Angkatan Kerja Lokal (AKL) = 6
- Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) = 1.321
- Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN) = 1.336

13. URUSAN KETAHANAN PANGAN

Capaian kinerja Urusan Ketahanan Pangan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) EKPPD dan berdasarkan RPJMD 2010-2015 menurut data dari Bagian Perekonomian dan Ketahanan Pangan Setda Wonosobo dan Dinas Pertanian dan Perikanan tahun 2015 :

- Ketersediaan Bahan Pangan Utama = 178,23%
- Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar = 5,49
- Jumlah desa mandiri pangan = 26
- % ketersediaan bahan pangan utama = 94
- Jumlah lumbung pangan = 17
- Tingkat skor PPH (Pola Pangan Harapan) = 92
- Tingkat konsumsi protein hewani (gr/kap/th) = 5,45
- Tingkat konsumsi protein nabati (gr/kap/th) = 6.953

14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan Berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2015 menurut data yang diperoleh dari Badan KKBPP dan PA Wonosobo tahun 2015 :

- Indeks Pembangunan Gender (IPG) = **92,51%**
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) = **45,36**
- Partisipasi Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah = **42,71 %**
- Angka Melek huruf Perempuan Usia 15 tahun ke atas = **98,24 %**
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan = **63,85 %**
- Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak = 212
- % kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani = 100

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Capaian kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2015 Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Berdasarkan RPJMD/RKPD Tahun 2015 dari BKKBP dan PA Wonosobo :

- Prevalensi peserta KB aktif = 80,90%
- Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I = 42,91%
- Angka Penurunan TFR (Total Fertility Rate) = 2,13
- Angka Penurunan laju pertumbuhan penduduk = 1,27
- Cakupan unmetneed = 7,93

16. URUSAN PERHUBUNGAN

Elemen Data Urusan Perhubungan Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja	Jumlah	
		2014	2015
1	Jumlah kendaraan angkutan barang	9.015	12.152
2	Jumlah kendaraan angkutan penumpang umum	1147	1181
3	Jumlah kendaraan roda 4 (empat)	21.792	21.812

Sumber : Kantor Perhubungan, 2015

17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah dan berdasarkan Indikator RPJMD 2010-2015 menurut data dari Bagian Komunikasi dan Telematika Setda 2015 :

- Tersedianya Website milik pemerintah daerah
- Tersedianya 17 paket media informasi publik yang diterbitkan oleh Pemerintah
- Pengunjung Website milik Pemerintah Daerah = 60167 pengunjung
- % paket informasi yang terpublikasikan secara langsung maupun melalui media = 100
- Jumlah SKPD yang memiliki Sistem Informasi Manajemen = 16 (16 online)
- % Ter-Update-nya atribut data spasial = 100
- % Jumlah Koneksi WAN ke seluruh Kecamatan = 93
- % Terpasangnya VOIP di setiap SKPD = 2,50

18. URUSAN WAJIB: PERTANAHAN

Pada tahun 2015 telah diterbitkan sertifikat tanah sebanyak 3.954 bidang tanah, yang difasilitasi melalui Prona sebanyak 3500 bidang, Proda sebanyak 125 bidang, sertifikasi tanah untuk kalangan Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 100 bidang, SMS 0 bidang, maupun secara reguler sebanyak 229 bidang.

19. URUSAN WAJIB: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Capaian kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Wonosobo dilihat dari IKK dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2015 dari Kantor Kesbangpol & Satpol PP dan Linmas Kab. Wonosobo adalah :

1. Kegiatan pembinaan politik daerah = 63
2. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP = 4
3. Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk = 0,51 %
4. Demo/protes thd Perda/Perbup per tahun = 5
5. Keberadaan Perda tentang PSK dan PKL= Ada

20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, PENGAWASAN, ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Capaian kinerja Urusan tersebut pada Tahun 2015 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah dan berdasarkan Indikator RPJMD 2010-2015 dari Bagian Orpeg, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Inspektorat dan DIPENDA :

1. % penyelesaian pelanggaran K3 = 100
2. Jumlah kegiatan penegakan perda = 120
3. Jumlah raperda yang diusulkan = 25
4. Jumlah perda yang ditetapkan = 5
5. Jumlah perbup = 79
6. Jumlah perda hasil inisiatif DPRD = 1
7. (Jml) Perda yang dievaluasi/dikaji = 0
8. % SKPD yang menyusun LAKIP = 100
9. % OPD yang telah menyusun SOP (Jumlah OPD) = 7
10. % SKPD yang memiliki SPM = 15
11. %SKPD yg menyusun IKU SKPD dan renstra SKPD = 100
12. Jumlah pelaksanaan kerjasama daerah = 4
13. % penetapan batas daerah = 100

21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2014-2015 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut data dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat tahun 2015 :

- Jumlah LPM Aktif = 265
- Jumlah kelompok PKK aktif = 8.731 (97,34%)
- Jumlah kelompok binaan PKK = 281
- Posyandu aktif = 1.226 (100%)
- Rasio rumah layak huni per jumlah total rumah = 79.441/213.509 (37,20%)

22. URUSAN SOSIAL

Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2015 berdasarkan Indikator RPJMD 2010-2015 sesuai data yang diolah dari Bagian Sosial dan Kesra tahun 2015 :

- % PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar = 42,85
- % PMKS mandiri = 46,35
- % PMKS terlayani jaminan sosial = 98,61
- Jumlah panti sosial = 17
- % Meningkatnya rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM) = 72,23

23. URUSAN KEBUDAYAAN

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2015 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai data dari DIKBUDPORA tahun 2015 :

- Penyelenggaraan festival seni dan budaya = 38
- Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya = 11
- Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan = 48%

24. URUSAN STATISTIK

Capaian Kinerja Urusan Statistik berdasarkan Indikator EKPPD sesuai data dari Bappeda Wonosobo tahun 2015 :

- Tersedianya Buku "Kabupaten dalam angka"
- Tersedianya Buku "PDRB Kabupaten"
- Tersedianya Buku "Statistik Daerah"

25. URUSAN KEARSIPAN

Capaian kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2015 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah dan berdasarkan Indikator RPJMD 2010-2015 :dari Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah :

- Penerapan Pengelolaan arsip secara baku = 82,50%
- Jumlah SKPD yg melaksanakan akuisisi arsip = 1 (satu)
- Jumlah tenaga kearsipan yang memiliki sertifikat kearsipan = 5
- Tersedianya kebijakan pedoman kearsipan = 1 paket
- Jumlah arsip yang terseleksi = 2425 bungkus

26. URUSAN PERPUSTAKAAN

Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan berdasarkan Indikator EKPPD dari Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah :

- Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah = $30.932/68.515 = 0,45$
- Pengunjung perpustakaan = 255.842
- **Jumlah** Perpustakaan Kabupaten = 1
- **Jumlah** Perpustakaan Desa = 68
- **Jumlah** Perpustakaan Kelurahan/Instansi = 14
- **Jumlah** Perpustakaan Sekolah = 641
- **Jumlah** Perpustakaan Rumah Ibadah = 26
- **Jumlah** Perpustakaan Pribadi = 2
- **Jumlah** Rumah Belajar = 21

27. URUSAN PERIKANAN

Capaian Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2015 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah dan berdasarkan RPJMD 2010-2015 dari Dinas Pertanian dan Perikanan adalah :

- Produksi perikanan = 132,44 %
- Konsumsi ikan = 102,38%
- Jumlah produksi perikanan budidaya (ton) = 9.036 ton
- Ikan Konsumsi (Kg) = 9.742.810
- Benih Ikan (ekor) = 53.033.243

28. URUSAN PERTANIAN

Produktivitas padi di tahun 2015 adalah 5,49 ton/ha di bawah target capaian tahun 2015 menurut RPJMD yaitu 6 ton/ha. Demikian pula, produksi tanaman padi di tahun 2015 yaitu 163.562 ton di bawah target capaian tahun 2015 yaitu 164.212 ton. Walaupun produktivitas pertanian sebagian

menurun, namun masih dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Wonosobo. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, pada tahun 2014 mencapai 44,50% yang merupakan kontribusi terbesar dari delapan sektor lainnya.

29. URUSAN KEHUTANAN

Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Berdasarkan IKK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Wonosobo serta BP DAS SOP Yogyakarta, (analisis 2015).:

- Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis : 0%
- Kerusakan Kawasan Hutan (Akibat Kebakaran Hutan pada musim kemarau) : 1,2%

30. URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Capaian kinerja Urusan ESDM Tahun 2015 berdasarkan Indikator Kinerja RPJMD 2010-2015
Sumber: SIPD, 2015 :

- % dusun berlistrik = 100%
- % rumah tangga yg terelektifikasi = 99,16%
- Rasio penyediaan daya listrik = 65,7%
- Jumlah SPBU = 9
- Agen LPG = 5

31. URUSAN KEPARIWISATAAN

Capaian kinerja urusan kepariwisataan di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari kunjungan wisatawan, yang pada tahun 2015 sebesar 869.791 orang jika dibandingkan tahun 2014 meningkat 44,73%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata Wonosobo semakin dikenal dan mendapat perhatian masyarakat baik lokal maupun mancanegara. Apabila dilihat dari kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2015 rata-rata menyumbang 7,62%. Peningkatan ini berasal dari sub sektor hotel, restoran dan jasa hiburan/rekreasi.

32. URUSAN PERINDUSTRIAN

Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2015 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB, yang pada tahun 2015 rata-rata menyumbang 16,32%. Jika dibandingkan tahun 2014 mengalami penurunan 0,04%. Sementara untuk pertumbuhan industri pada tahun 2015 pertumbuhannya meningkat sebesar 7,21% dibandingkan tahun 2014 yang sebagian besar berasal dari industri makanan dan minuman yang meningkat sebesar 6,21%.

33. URUSAN PERDAGANGAN

Capaian kinerja urusan perdagangan di Kabupaten Wonosobo yang berasal dari Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo tahun 2015, dapat dilihat dari kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, yang pada tahun 2015 rata-rata menyumbang 17,73%. %. Jika dibandingkan tahun 2014 mengalami penurunan 1,39%. Penurunan tersebut disebabkan dampak dari kebakaran pasar induk Wonosobo tahun 2014.

Sedangkan nilai ekspor bersih pada tahun 2015 sebesar \$ 50.123.595. Kondisi ini menurun 10,59% dibandingkan tahun 2014. Komoditas ekspor non migas ini masih berasal dari empat komoditas dengan dua belas negara tujuan di mana volume ekspor terbesar didominasi oleh ekspor kayu olahan dengan negara tujuan Jepang, USA, Malaysia, Korea, China, Taiwan, Turki.

34. URUSAN KETRANSMIGRASIAN

Capaian urusan ketransmigrasian berdasarkan data dari Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo tahun 2015 adalah :

- Jumlah kerjasama antar daerah guna memperoleh lokasi transmigrasi (lokasi) = 2
- Jumlah calon (KK) Transmigran yang ditempatkan = 7 KK

D. TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Wonosobo menerima tugas pembantuan dari Pusat dan Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan (urusan kesehatan): Rp.2.770.737.000,-,
2. RSUD KRT. Setjonegoro (urusan kesehatan) : Rp.9.499.200.000,-
3. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (urusan ketenagakerjaan) : Rp.1.314.104.000,-
4. Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (urusan kependudukan dan pencatatan sipil) : dari jumlah sebesar Rp.1.728.620.000,- terealisasi sebesar 76% atau sebesar Rp.1.220.115.733,- untuk pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu dan penyelenggaraan Administrasi kependudukan Kabupaten Wonosobo.
5. Dinas Pertanian dan Perikanan (urusan pertanian): Dari jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 16.714.389.000,- terealisasi sebesar 67,8% atau sebesar 11.334.038.000,-

Selain tugas pembantuan dari APBN dan APBD Provinsi, Pemkab memberikan tugas pembantuan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan

Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pada tahun 2015 alokasi dana desa untuk 236 desa di 15 kecamatan sebesar Rp. 77.726.669.694,-.

E. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Tugas umum pemerintahan mencakup tujuh pelaksanaan tugas koordinatif antar elemen Pemkab Wonosobo dalam menangani:

1. Kerjasama antar daerah, meliputi kerjasama dalam bidang: Kerjasama Penempatan Transmigran, Kerjasama Pengelolaan Waduk Wadaslintang, Kerjasama Pengelolaan Dieng, Kerjasama Penataan Kawasan Kledung, Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan, Program Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat dan Kerjasama Pembangunan Bendungan Bener.
2. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang ditandatangani pada tahun 2015 adalah dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan, PD. BPR BANK WONOSOBO, Kesepakatan Bersama Bupati Wonosobo, Ketua Komnas HAM, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Direktur Eksekutif International Forum on Indonesian Development (INFID) Nomor 180/4/2015 (Wonosobo), 086/TUA/IV/2015 (Komnas HAM); 070/MoU/ELSAM/IV/2015 (ELSAM); dan 002/006/008/IV/2015 (INFID) tanggal 4 Mei 2015 tentang Pengembangan Wonosobo Sebagai Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia, Kesepakatan bersama antara Bupati Wonosobo dan INFEST Yogyakarta Nomor 140/7/2015 dan Nomor 57/MoU/INFEST/V/2015 tanggal 8 Mei 2015 tentang Progam penguatan kapasitas Desa.
3. Koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah, melalui Forum Warga dan Kolom khusus info pembangunan Wonosobo dilaksanakan bekerjasama dengan surat kabar harian Wonosobo Ekspres.
4. Pembinaan batas wilayah, yaitu Pembuatan Peta Batas Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Batas Wilayah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Tetangga dan Pembakuan Nama Rupa Bumi.
5. Pencegahan dan penanggulangan bencana sejak tahap pra, selama dan pasca bencana.
6. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, melalui koordinasi jajaran Pemkab dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda), Kodim, Polres dan unsur lainnya.

F. PENUTUP

Sebagai catatan akhir, capaian penyelenggaraan pemerintahan tahun 2015 masih terdapat beberapa kelemahan, dan harus diperbaiki di masa mendatang. Bagaimanapun, beberapa hasil yang dicapai tahun 2015 ini semoga bisa memberikan basis yang lebih kuat bagi pembangunan Kabupaten Wonosobo di tahun 2016, yang merupakan periode pertama dalam masa pemerintahan di bawah kepemimpinan pasangan Bupati **Eko Purnomo, S.E., M.M.** bersama Wakil Bupati **Ir. Agus Subagiyo, M.Si.**, berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021.

Oleh karena itu, jajaran Pemerintah Kabupaten terbuka menerima evaluasi objektif, saran, masukan konstruktif dan alternatif solusi dari berbagai pihak untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan, sesuai visi "**Wonosobo bersatu untuk maju, mandiri, dan sejahtera untuk semua**".

Wonosobo, Juni 2016

BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, S.E.,M.M.

Kritik, masukan dan informasi lebih lanjut agar disampaikan kepada:
Bagian Komunikasi dan Telematika Setda (eks-Bagian Humas Setda) Kabupaten Wonosobo,
Jl. Soekarno-Hatta 2-4 Wonosobo 56311 telp. 0286-321345
e-mail: humas_wsb@yahoo.com atau humas.wsb24@gmail.com